

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DPRD TENTANG ANGGARAN,
PEMAHAMAN REGULASI DAN PENGALAMAN TERHADAP PERAN
ANGGOTA DEWAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada DPRD Pemerintahan Provinsi Riau)**

Oleh :

Firda Kharimah

Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Rusli

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email:firdakharimah@gmail.com

*The Influence of Knowledge Legislators About Budgeting, Understanding The
Regulation and Experience to The Role of Legislators in The Area
of Financial Supervision*

ABSTRACT

The research aims to analyze of influencing of knowledge legislators about budgeting, understanding the regulation and experience to the role of legislators in the area of financial supervision. Object of this research is DPRD Riau Province. There are forty four questionnaires were sent, but only forty four questionnaires are returned. That data are analyzed by linear regression method and SPSS program version 19. The variables were examined influencing of knowledge legislators about budgeting, understanding the regulation and experience to the role of legislators in the area of financial supervision. The results of this research showed influencing of knowledge legislators about budgeting has an effect to the role of legislators in the area of financial supervision with 0,000 significance, understanding the regulation has an effect to the role of legislators in the area of financial supervision with 0,002 significance and experience has an effect to the role of legislators in the area of financial supervision with 0,000 significance. The results of this research also showed that coefficient R square is 72,2%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independent variables could explain dependent variable well. While the remaining influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.

Keywords: Knowledge, Budgeting, Regulation, Experience, and Supervision

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang

mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah, secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna, 2007). DPRD mempunyai hak untuk mengetahui

dan mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran. Permasalahan yang terjadi dan berkaitan dengan rendahnya peran anggota DPRD mengakibatkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk keseluruhan proses APBD, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna,2007)

Program kerja yang dirancang dalam anggaran belum sesuai dengan prioritas daerah dan mengakibatkan terbukanya peluang yang besar terhadap permasalahan anggaran seperti penyelewengan anggaran. Lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah.

Perkembangan nilai demokrasi yang mengarahkan anggota DPRD untuk menyelenggarakan pemerintah daerah serta mengawasi APBD yang telah direncanakan, maka untuk melaksanakan pengelolaan APBD tersebut perlu diwujudkan peranan anggota yang memahami dan kualifikasi ideal dari peran anggota DPRD secara baik dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik serta pemerintahan yang memadai.

Penyusunan anggaran wajib diawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaannya serta pelaporan. Proses pengawasan akan dikontrol baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengendalikan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan bagian dari rencana keuangan yang disusun guna mempresentasikan pendapatan dan

belanja pemerintah dalam satuan moneter.

Pengawasan keuangan daerah yang diartikan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Pasal 16 menyebutkan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan dilakukan secara langsung dan tidak langsung serta prefentif dan represif.

Menurut Roseptalia (2006) pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota DPRD dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun dijalankan sesuai dengan perencanaan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan menjaga hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Salah satunya adalah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran akan semakin penting bila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. Hasil penelitian Werimon

(2005), menyatakan bahwa ada terdapat hubungan positif variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan yang dimiliki anggota DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya (Yudoyono, 2000). Pengetahuan anggota DPRD dalam memahami hak, tugas, dan wewenangnya mampu mengaplikasikan secara baik dan mendukung terhadap peranan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan keuangan daerah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah adalah pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi lainnya yang menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu pengalaman juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman anggota dewan dalam berbagai organisasi yang diikuti oleh anggota dewan sebelum terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh terhadap

peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah? 2) Apakah pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah? 3) Apakah pengalaman berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 3) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Badan Anggaran yang dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 orang ketua dan paling banyak 2 orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah dan proporsional dengan mempertimbangkan

keterwakilan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Tugas dari Badan Anggaran adalah membahas bersama Walikota yang diwakili oleh SKPD untuk menentukan pokok-pokok kebijakan yang menyangkut pendapatan dan belanja daerah secara umum serta prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun usulan anggaran, menetapkan pendapatan daerah bersama Walikota dengan mengacu pada usulan Komisi terkait, membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama Walikota yang dapat diwakili oleh SKPD dengan mengacu pada keputusan Rapat Kerja Komisi dan Walikota mengenai alokasi anggaran.

Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang

peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Pemahaman Regulasi

Menurut Witono dan Baswir (2003), peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan

dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Adanya undang-undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah.

Pengalaman

Dalam rangka pengawasan keuangan dilingkungan pemerintah daerah ataupun pusat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah harus memiliki kualitas sumberdaya manusia yang di dukung pengalaman yang memadai dalam menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Pengalaman aparatur pemerintah mendukung terbentuknya keahlian dalam menjalankan penugasan. Disamping itu pengalaman juga akan mempengaruhi tingkat pengetahuan aparatur pemerintah. Semakin banyak pengalaman aparatur pemerintah maka akan semakin tinggi pengetahuan mereka dalam bidang tersebut. Pengaruh pengalaman terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban aparatur pemerintah terhadap pemenuhan PP No 71 th 2010.

Pendapat yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang dapat dilihat dari pengalaman yang telah ia miliki. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman aparatur pemerintah dalam bidang akuntansi mampu membantu aparatur pemerintah dalam menjalankan penerapan PP No 71

th2010. Satuan kerja dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual menjadi landasan penting untuk mencapai level penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implemntasi sistem yang baru.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Warimon et.al (2007) menyatakan bahwa anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dalam menjalankan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan anggota dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian anggota dewan dalam

berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya (Murni dan Witono, 2003).

Warimon et.al (2007) menyebutkan bahwa, pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak, kemudian pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian maka pengetahuan akan memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan.

H1: Diduga pengetahuan anggota dewan tentang DPRD berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah

Pengaruh Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah. Menurut Badei dan Witono (2003) menyatakan bahwa peraturan yang tertera pada regulasi pemerintah dalam pengawasan keuangan daerah menjelaskan tindakan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap peran

anggota DPRD dalam pengawasan daerah, karena adanya regulasi tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah telah sesuai dengan tahapan tahapan dan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan (Kartika Dewi Sari, 2012).

H2: Diduga pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah

Pengaruh Pengalaman Anggota DPRD terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap

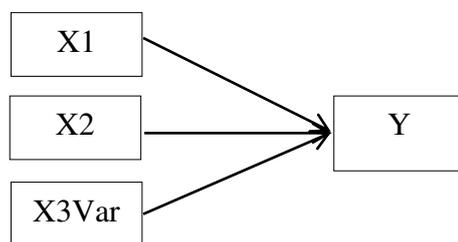
dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Slamet (2009) menjelaskan bahwa pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja aparat pengawas, sampai tingkat mana seseorang berhasil pada pekerjaannya, berpartisipasi aktif, dan memiliki anggapan bahwa kinerja merupakan hal penting dan berkaitan dengan harga dirinya.

H3: Diduga pengalaman berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2016

METODE PENELITIAN

Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi secara umum tentang pengambilan data terhadap objek penelitian (Ghozali, 2013:79) sedangkan sampel didefinisikan sebagai wilayah dari bagian populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD Provinsi Riau. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive*

sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu kriteria. Pengambilan sampel pada Komisi C dan Badan Anggaran dilakukan dengan alasan bahwa judul yang diangkat adalah untuk meneliti peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini melibatkan Komisi C selaku Bidang Keuangan dan Badan Anggaran yang memahami tentang keuangan daerah.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurinya.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data

yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah serta kebijakan namun bukan pemeriksaan.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai

pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah. Pengalaman merupakan variabel yang diukur melalui pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Pengalaman ini mengukur peran atau keaktifan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Berikut ini adalah tabel yang disajikan dalam uji validitas dan reliabilitas

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas 812 instrument penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data

No	Variabel	Nilai Cronbach	Nilai Validitas
1	Y	0,735	0.000
2	X1	0,743	0.000
3	X2	0,729	0.000
4	X3	0,720	0.000

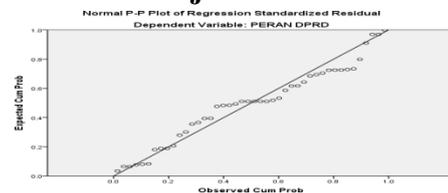
Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresitidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukkan normalitas data dari suatu penelitian.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau nilai VIF > 10.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolonieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peengganggu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari mutikolonieritas didalam penelitian. Uji multikolonieritas digunakan untuk varians data. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

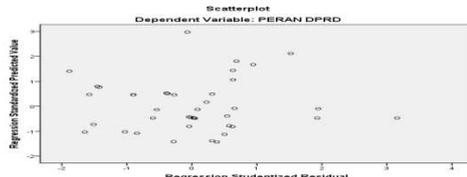
Variabel	Tolerance	VIF
X1	.694	1.440
X2	.652	1.535
X3	.813	1.231

Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber :Data Olahan, 2016

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian

menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur peengaruh atau tidaknya:

$$P = 8,500 + 0,812X1 + 0,780X2 + 0,853X3 + e$$

- Nilai konstanta (α) sebesar 8,500. Artinya adalah apabila variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, pemahaman regulasi dan pengalaman diasumsikan nol (0), maka peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 8,500.
- Nilai koefisien regresi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sebesar 0,812. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0,812.
- Nilai koefisien regresi pemahaman regulasi sebesar 0,780. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemahaman regulasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0,780.
- Nilai koefisien regresi pengalaman sebesar 0,853. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengalaman sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0,853, sehingga ada pengaruh dalam pengawasan keuangan daerah yang memiliki peningkatan.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.10 didapat nilai t_{hitung} senilai 7,484. Nilai t tabel sebesar 2,019, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 41 (n -banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 7,484 > t_{tabel} 2,019$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sementara itu, dalam tabel 4.10 didapat P value 0,000 yang berarti P value $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki anggota DPRD tentang anggaran maka akan semakin tinggi peranan anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.10 didapat nilai t_{hitung} senilai 4,190. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 4,190 > t_{tabel} 2,019$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sementara itu, dalam tabel 4.10 didapat P value 0,002 yang berarti P value $0,002 < 0,05$. Berdasarkan

hitungan tersebut, diketahui bahwa pemahaman regulasi berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin paham anggota dewan dalam regulasi yang mengatur tentang anggaran, maka akan semakin tinggi peranan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.10 didapat nilai t_{hitung} senilai 6,065. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 6,065 > t_{tabel} 2,019$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengalaman berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan **H₃ diterima** yaitu pengalaman berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sementara itu, dalam tabel 4.10 didapat P value 0,000 yang berarti P value $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi pengalaman yang dimiliki anggota dewan dalam menjalankan anggaran maka akan semakin tinggi peranan anggota dewan dalam menjalankan fungsi keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa anggota dewan yang memiliki pengetahuan tentang mekanisme anggaran akan mempengaruhi peranannya dalam mengawasi keuangan daerah.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan pemahaman regulasi berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti anggota dewan yang memahami aturan, kebijakan dan ketentuan selama menyusun anggaran akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.
- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan pengalaman berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa pengalaman yang dimiliki anggota dewan dalam menjalankan profesi sebagai anggota dewan akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada DPRD Provinsi Riau, namun dapat meneliti pada DPRD di Provinsi lainnya.

- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan tingkat pendidikan dan jabatan politik dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
- 3) Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2013. *Implementasi Standar Pemakaian Program SPSS*. Salemba Empat. Jakarta
- Kartika, Dewi Sari. 2012. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Telaah Riset Ilmiah
- PP No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Roseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*, Skripsi.Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.
- Slamet.2009. *Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.Jurnal Ilmiah dan Akuntansi.
- Werimon, Simson, 2005. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.Tesis Program Pasca Sarjana Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Negeri Makasar.
- Witono, Banu. 2003. *Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peranan DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol 16.
- Yudhoyono. 2000. *Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota/Kabupaten se-Indonesia*. Jurnal Ilmiah dan Telaah Riset.